

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Data menunjukkan terjadinya peningkatan transparansi, dengan 92% dari total anggaran Rp. 87,5 miliar pada tahun sebelumnya. Implementasi sistem ini menyediakan informasi yang komprehensif mencakup detail paket pengadaan, anggaran, metode pemilihan, dan lokasi yang dapat diakses publik. Dari segi ketepatan waktu, sekitsr 85% rencana pengadaan telah dipublikasikan pada awal tahun anggaran sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat 15% paket yang publikasinya mendekati waktu pelaksanaan.

Dampak positif penerapan SIRUP terlihat dari peningkatan efisiensi anggaran dengan hemat rata rata 12% dalam tiga tahun terakhir, penurunan temuan penyimpangan prosedur sebesar 40%, serta peningkatan kepuasan masyarakat dari 65,2% pada 2020 menjadi 78,5% pada 2023. Meski demikian, tantangan masih ditemui terutama dalam hal akses bagi masyarakat di kawasan hutan yang memiliki keterbatasan internet dan pemahaman teknologi. Secara keseluruhan, SIRUP telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Bsrat, yang berdampak positif pada kualitas pelayanan publik dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana publik sektor kehutanan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan laporan tugas akhir yang disampaikan, saya dapat menyusun beberapa saran untuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan keuangan melalui SIRUP.

Untuk meningkat efektivitas implementasi SIRUP, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu mengembangkan dashboard monitoring yang real – time untuk memudahkan pemantauan realisasi pengadaan barang dan jasa, serta menerapkan sistem peringatan dini untuk pengadaan yang beresiko terlambat. Integrasi sistem juga perlu ditingkatkan dengan mengembangkan koneksi penuh antara SIRUP dan sistem keuangan daerah serta platform e-procurement lainnya. Pengembangan kapasitas SDM harus menjadi prioritas melalui program pelatihan lanjutan dan sertifikasi khusus bagi admin SIRUP, disertai pembentukan komunitas praktisi SIRUP di lingkungan pemerintah Sumatera Barat untuk berbagi pengalaman dan solusi. Penting juga untuk memperluas jangkauan sosialisasi SIRUP kepada masyarakat di kawasan hutan dengan menyediakan sarana akses internet yang memadai dan edukaasi penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Peningkatan transparasi juga dapat dilakukan dengan mempublikasikan laporan berkala tentang dampak penggunaan anggaran terhadap program kehutanan yang dapat diakses melalui berbagai media, baik digital maupun konvensional, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat memperoleh informasi yang sama.

